

Kertas Posisi WALHI

Pengembangan Monokultur Praktik Buruk Pembangunan

Diterbitkan dalam rangka peringatan Hari Anti-Monokultur Sedunia, 21 September 2012

Tinjauan Sejarah

Pengembangan komoditi dengan melakukan penanaman secara monokultur (satu jenis tanaman) dalam luasan besar dan masif (perkebunan skala besar) memang telah berlangsung selama ratusan tahun di Indonesia. Perkebunan kayu skala besar sudah dirintis sejak abad ke-19 yaitu sekitar tahun 1847 oleh pemerintahan kolonial Belanda untuk pemenuhan kebutuhan pembuatan kapal-kapal perang dan kapal-kapal dagang Belanda. Di samping pembangunan kebun kayu secara monokultur dan masif, penguasa kolonial juga memaksakan monokulturisasi melalui sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) di sekitar tahun 1830 sampai dengan tahun 1870 untuk pemenuhan kepentingan pasar Eropa, dimana tujuan utamanya adalah untuk menutupi kas anggaran pemerintah Belanda yang defisit. Pembangunan kebun-kebun komoditas tertentu dilakukan secara luas (*estate*) seperti, kopi, teh, tembakau dan tebu, di samping tanaman kayu (yaitu kayu jati) yang dibudidayakan secara masal untuk kebutuhan kapal-kapal perang dan kapal-kapal dagang Belanda.

Monokulturisasi melalui sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) yang digagas oleh Gubernur Jendral Belanda Graaf Johannes van den Bosch secara ekonomi memang signifikan membantu perbaikan ekonomi Belanda, namun secara sosial budaya dan lingkungan justru sangat merugikan rakyat di daerah jajahan (terutama Jawa). Adanya kebijakan pembangunan kebun-kebun monokultur skala besar tersebut membuat pemerintahan kolonial Belanda mengalami masa keemasan ekonomi sedari tahun 1835 sampai dengan tahun 1940. Namun dampak yang sangat nyata justru dialami masyarakat di Jawa dimana tercatat krisis pangan dan bencana kelaparan terjadi sejak 1843.

Berlanjutnya praktik monokulturisasi: meningkatkan kerentanan rakyat dan ekosistem

Belajar dari pengalaman tersebut, harusnya model pembangunan rakus lahan yang homogenik dan merusak kondisi lingkungan, sosial dan budaya hendaknya dihindari. Kerentanan terhadap krisis pangan dan air sebagai akibat dari praktik monokulturisasi telah menempatkan rakyat pada posisi yang paling rentan (*vulnerable*) dan menjadi korban dari model pembangunan yang merusak tersebut. Perkebunan monokultur skala besar juga berpengaruh terhadap ledakan populasi spesies flora dan fauna tertentu yang tidak terkontrol oleh rantai makanan alamiah suatu ekosistem sehingga akan menimbulkan permasalahan baru yang sangat mengganggu seperti ledakan populasi belalang, ledakan populasi ulat bulu dan sebagainya.

Rawa Tripa: contoh dampak praktik monokulturisasi

Salah satu dampak nyata dari sistem monokultur yang merusak adalah tragedi di Rawa Tripa, Aceh, dimana akibat konversi hutan Rawa Tripa menjadi ladang perkebunan kelapa sawit skala besar berdampak nyata terhadap kualitas lingkungan dan menghancurkan habitat hewan-hewan endemik Sumatera seperti orangutan sumatera (*pongo abelii*). Perubahan bentang alam di Rawa Tripa juga berdampak buruk pada fungsi hidrologis kawasan setempat dan sangat merugikan masyarakat di sekitar Rawa Tripa yang sumber penghidupannya juga bergantung pada kawasan tersebut.

Food estate: praktik *cultuurstelsel* gaya baru

Model pembangunan kawasan pangan yang disebut dengan istilah *food estate* merupakan penerapan *cultuurstelsel* gaya baru dimana dengan alasan pemenuhan kebutuhan pangan justru memberikan pembelajaran buruk bagi tata kelola lingkungan dan kedaulatan pangan rakyat. Kebijakan monokulturisasi hendaknya segera dihentikan karena juga berdampak pada hilangnya sumber pangan-pangan lokal yang berujung pada krisis pangan. Diversifikasi pangan rakyat melalui revitalisasi budaya pangan lokal justru memberikan kemampuan bagi rakyat untuk mengembangkan sumber-sumber penghidupannya melalui ruang-ruang produktivitas yang jauh memiliki kontribusi bagi kesejahteraan ketimbang model-model pengembangan kebun-kebun monokultur skala besar.

Posisi WALHI: hentikan monokulturisasi

Bersamaan dengan peringatan Hari Anti Monokultur Sedunia, WALHI mengingatkan pemerintah Indonesia akan pengalaman pahit pengembangan industri pangan melalui proyek lahan gambut sejuta hektar serta pengalaman pahit masa kolonialis liberal Hindia Belanda yang telah merusak sendi-sendi kehidupan rakyat. WALHI meminta pemerintah untuk menghentikan model pengembangan perkebunan besar monokultur yang rakus lahan karena terbukti tidak mampu memperbaiki kesejahteraan rakyat, namun justru lebih banyak memberikan dampak negatif bagi keberlanjutan lingkungan dan keselamatan rakyat.

WALHI kembali mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk menghentikan pengembangan dan perluasan kebun-kebun monokultur skala besar, mengevaluasi monokulturisasi yang sudah berlangsung, melakukan audit menyeluruh terhadap perijinan yang sudah dikeluarkan, menyelesaikan konflik sosial yang terjadi, menghentikan praktik-praktik "pemutihan" pelanggaran Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dan segera melakukan moratorium konversi hutan berbasis capaian, dengan prinsip dan kriteria yang jelas dan bukan berbatas tahun.

Sudah saatnya pemerintah Indonesia mengkaji keberadaan investasi rakus lahan dan menggantikannya dengan mendorong pengelolaan pertanian berbasis rakyat, mendorong

pengelolaan kawasan hutan berbasis rakyat dan komunitas, serta mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat atas wilayah kelolanya untuk perwujudan pembangunan yang berkeadilan dan lestari.

Dalam kesempatan ini pula, WALHI menyerukan kepada para profesional, akademisi dan penggiat-pengiat lingkungan dan hutan untuk mulai bekerja serius dalam perlindungan dan pelestarian hutan dengan mengutamakan hak dasar bagi penduduk di sekitar dan dalam wilayah hutan. Juga, mengembangkan pertanian berbasis kearifan lokal, serta menjadikan rakyat Indonesia tuan di atas tanah dan negerinya sendiri.

Jakarta, 21 September 2012
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Abetnego Tarigan
Direktur Eksekutif Nasional